TEMATICS | Technology Management and Informatics Research Journals

Vol. 4 No. 2 2020

Submitted 09-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 12-10-2020

PENINGKATAN EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KEIMIGRASIAN DENGAN INFOGRAFIS MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL

Enhancement The Effectiveness Of Government Communications In Infographic Immigrations Through Social Media Platform

Riyan Herriandi Putra
Politeknik Imigrasi
BPSDM HUKUM DAN HAM
Handphone: 087888354238
e-mail: herriandi@gmail.com

ABSTRACT

The infographic content published by the Immigration Technical Service Unit is considered to have not maximized regarding the use of design elements referring to Visual Communication Design Theory. This is due to the lack of the public relations staff's knowledge of the theory and their educational background that are not related to communication design. The purposes of this research are to know the quality of government communication through infographic media and the importance of infographic media as a means to spread information, especially immigration information as well as this study has the impact of proposing standardization on the infographics published by each technical service unit under the Directorate General of Immigration. In this study, the authors used a qualitative approach with descriptive methods by collecting data through interviewing techniques for respondents and observations made in a comprehensive manner. in the network to get credible data. The results of this study are proven that the use of design elements in Visual Communication Design Theory has not been maximal in the place where the author conducted the research. Therefore the authors provide a recommendation for the existence of guidelines that contain standardization of infographic layout designs that will equalize all design elements for use by designers in each Immigration Technical Service Unit. In addition, to improve image and positive public perceptions of each Immigration Technical Service Unit as well as increase public confidence in in an information that published by each Immigration Technical Service Unit.

Keywords: Infographic, Visual Communication Design Theory and Standardization.

ABSTRAK

Konten infografis yang dipublikasikan oleh Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian dinilai belum maksimal dalam penggunaan unsur-unsur desain yang ada pada Teori Desain Komunikasi Visual. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan staf pelaksana humas akan teori tersebut dan latar belakang pendidikan yang tidak berkaitan dengan desain komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mutu komunikasi pemerintahan melalui media infografis dan nilai penting media infografis sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi khususnya informasi keimigrasian serta untuk mengajukan standardisasi pada infografis yang diterbitkan oleh setiap unit pelayanan teknis yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui teknik

Vol. 4 No. 2 2020

Submitted 09-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 12-10-2020

wawancara terhadap responden dan observasi yang dilakukan secara dalam jaringan untuk mendapatkan data kredibel. Hasil penelitian ini adalah terbukti bahwa belum maksimalnya penggunaan unsur-unsur desain yang ada pada Teori Desain Komunikasi Visual di tempat penulis melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis memberikan sebuah rekomendasi terhadap adanya pedoman yang berisi tentang standardisasi desain infografis yang akan menyamakan seluruh unsur desain untuk digunakan oleh para desainer dimasing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian. Selain itu untuk meningkatkan citra dan persepsi positif publik kepada masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian maupun meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu informasi yang disebarkan oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian.

Kata Kunci: Infografis, Teori Desain Komunikasi Visual dan Standardisasi.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan ilmu yang sangat luas dan kompleks, berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, agama dan kehidupan manusia universal. Komunikasi merupakan substansi perkembangan kehidupan masyarakat, karena terbentuknya interaksi sosial diawali oleh adanya komunikasi antarindividu, antarmasyarakat, dan antarbangsa (pemerintahan). Dengan pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan konsep yang multimakna. (Arifin, 1988)

Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau disebut sebagai komunikasi pemerintahan merupakan suatu kegiatan yang bermaksud untuk memberikan informasi pada masyarakat luas. Komunikasi pemerintahan sendiri yang dimaksud adalah komunikasi yang ditujukan secara eksternal diluar organisasi pemerintahan itu sendiri (Abidin, 2016). Kegiatan komunikasi kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak dan bersifat regulatif (memberikan informasi tentang kebijakan atau peraturan baru). Pemberian informasi ini dapat dengan berbagai media, salah satunya adalah media infografis.

Berdasarkan penjelasan dari Widayanti manusia mempunyai lima indera untuk memetakan informasi yang diakses sehingga manusia dapat terhubung dengan "dunia besar" yaitu dunia luar (Widayanti, 2013). Kelima indera itu adalah penglihatan (*visual*), pendengaran (*auditory*), perabaan atau perasaan (*kinesthetic*), penciuman (*olfactory*), dan pengecapan (*gustatory*). Dalam buku karya dari Petterson menjelaskan bahwa:

"What we see is very important for our experience and perception of the world. Seeing is direct and effortless, making and understanding visual messages is natural to a point."

Dari penjelasan bukunya tersebut menjelaskan bahwa pesan atau informasi yang bersifat visual akan lebih mudah diterima dan diserap informasinya oleh individu (Pettersson, 1993). Oleh karena itu, belakangan ini banyak informasi yang disampaikan melalui media visual dibungkus dengan desain yang unik dan menarik. Salah satunya adalah media infografis.

Infografis merupakan suatu media yang sifatnya visual, dibuat untuk memberikan informasi kepada publik atau masyarakat. Dengan infografis penyebaran suatu informasi akan menjadi lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh masyarakat awam, dikarenakan infografis sendiri menyampaikan suatu informasi berdasarkan media visual. Media visual tersebut berupa informasi yang digambarkan secara jelas dan menarik sehingga akan mudah untuk menarik perhatian dan menjelaskan suatu informasi yang rumit menjadi sederhana. Selain itu masyarakat juga akan mengimplementasikan informasi yang

Vol. 4 No. 2 2020

Submitted 09-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 12-10-2020

disebarkan melalui infografis. Tetapi jika suatu media infografis tidak diolah dengan baik dengan kata lain tidak adanya standardisasi desain infografis maka timbul kurang percayanya masyarakat terhadap suatu informasi yang disebarkan melalui infografis tersebut. Fenomena ini ditunjukan dengan adanya tanggapan masyarakat tentang mutu yang dikeluarkan atau disebarkan oleh Unit Pelayanan Teknis. Situasi tersebut yang menstimulasi saya untuk mengangkat tulisan ini yaitu mempertanyakan mutu infografis pada Unit Pelayanan Teknis. Dimana terdapat kurang percayanya masyarakat terhadap infografis yang dikeluarkan oleh suatu Unit Pelayanan Teknis.

Oleh karena itu perlu adanya suatu standardisasi dimana terdiri dari indikator penanda ciri khas asal instansi dan keabsahan informasi yang dituangkan pada infografis tersebut dan indikator lainnya yang tekait dengan dengan desain infografis itu sendiri. Infografis memiliki banyak keunggulan dibandingkan media – media lain seperti brosur, bulletin, surat kabar, majalah dan lain – lain. Penyampaian pesan atau informasi melalui media komunikasi visual akan lebih mudah dimengerti terlebih lagi jika dibungkus dalam bentuk infografis. Keunggulan media infografis antara lain visualisasi gambar mampu menggantikan penjelasan yang terlalu panjang serta menggantikan tabel yang rumit dan penuh angka (Arigia et al., 2016).

Pemerintah mempunyai dasar dalam melakukan penyebaran informasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Intansi Pemerintahan. Peraturan tersebut mengatur bagaimana humas bekerja dalam suatu instansi pemerintahan dan bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Peraturan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam membangun dan mengembangkan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif dan efisien yang menciptakan hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamasi sekaligus bertujuan menciptakan pengelolaan kehumasan di lingkungan instansi pemerintah pusat serta daerah yang lebih baik.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai bagian khusus untuk menyebarkan informasi kepada publik, yaitu Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian disetiap unit pelayanan teknis yang bekerja dibawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi juga mempunyai bidang atau seksi yang mengatur keluar masuknya berita pada setiap unit pelayanan teknis, yaitu Bidang Teknologi Informasi Keimigrasian atau Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian. Dengan arus penyebaran berita yang sangat mudah untuk disebarkan melalui *platform* media sosial dengan menggunakan Instagram, Twitter, Facebook, dan lain–lain dibutuhkannya suatu aturan maupun ketetapan bagaimana sebuah infografis harus berbentuk atau mempunyai gambaran (*layout*) yang menandakan bahwa infografis yang dikeluarkan dari masing – masing unit pelayanan teknis memang benar dikeluarkan oleh unit pelayanan teknis pada setiap daerah yang bernaung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Oleh karena itu, peran dari Direktorat Jenderal Imigrasi diperlukan dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini.

Dalam suatu infografis tata letak gambar, ukuran huruf, bentuk huruf, ukuran logo, pewarnaan serta *layout* merupakan hal – hal yang tidak boleh di pandang remeh dalam pembuatannya. Bagi instansi pemerintahan yang memberikan banyak informasi penting dari suatu infografis memerlukan tata letak atau *layout* yang harus mempunyai standar yang sama. Hal ini diperlukan agar infomasi yang diberikan memang benar keabsolutannya dari

Vol. 4 No. 2 2020

Submitted 09-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 12-10-2020

instansi terkait. Tanpa adanya penataan *layout* yang sama dari masing – masing unit pelayanan teknis maka dampak buruk yang ditimbulkan adalah dapat munculnya ketimpangan informasi atau tidak adanya informasi yang jelas dari sebuah informasi yang tersebar.

Dengan adanya infografis komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada setiap unit pelayanan teknis akan menjadi lebih meningkat selain itu pelayanan yang ada menjadi lebih jelas dan transparan. Hal tersebut dikarenakan infografis sendiri merupakan bagian dari komunikasi pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan pada era digital atau era percepatan penyebaran informasi. Oleh karena itu penting adanya penyamaan atau standardisasi pada pembuatan desain sebuah infografis yang akan diberikan pada masyarakat. Penyamaan desain tersebut akan di implementasikan melalui media sosial. Standardisasi ini akan sangat berguna demi tidak adanya ketimpangan informasi atau pertanyaan terkait keabsahan informasi yang akan tersebar nantinya.

Standarisasi ini nantinya akan dituangkan kedalam sebuah pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pedoman ini nantinya akan wajib di ikuti oleh seluruh Unit Pelayanan Teknis baik Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI maupun Non TPI, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI maupun Non TPI, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI maupun Non TPI, Kantor Imigrasi Kelas 3 TPI maupun Non TPI.

Pengimplementasian standarisasi ini oleh setiap unit pelayanan teknis, akan memberikan warna yang selaras pada setiap infografis yang dikeluarkan. Kemudian dengan adanya hal ini akan meningkatkan kredibilitas yang dimiliki oleh unit-unit pelayanan teknis yang bekerja dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu akan menimbulkan citra atau *image* yang baik di mata masyarakat bahwa memang Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai satu kesatuan penyebaran informasi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh O'brien bahwa suatu informasi harus memenuhi atribut informasi (O'Brien, 2003). Dimana atribut-atribut informasi tersebut berperan penting untuk memenuhi standar dari sebuah informasi yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara terhadap responden mengenai masalah yang penulis angkat dan observasi yang dilakukan dalam jaringan. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap infografis yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi untuk mendapatkan standardisasi desain infografis yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penelitian ini tidak hanya berlokasi pada satu tempat penelitian saja tetapi berlokasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekertariat Direktorat Jenderal Imirasi dan akan berfokus pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus NON Tempat Pemeriksaan Imigrasi Jakarta Selatan.

Penulis mengambil lokasi penelitian yang berfokus pada beberapa kantor imigrasi yang telah disebutkan. Dengan alasan aktivitas media sosial khususnya Instagram pada masing-masing kantor imigrasi tersebut memiliki berbagai jenis keadaan. Pemilihan Kantor Imigrasi yang dijadikan lokus penelitian oleh penulis memiliki kriteria dimana akun media sosial dari lokus

Vol. 4 No. 2 2020

Submitted 09-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 12-10-2020

penelitan penulis mempunyai banyak *followers*[1], kemudian aktivitas *posting*[2] yang sering dilakukan dan dua dari tiga kantor imigrasi yang disebutkan telah ter-*verified*[3] oleh Instagram. Selain itu penulis juga melakukan penelitian pada Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekertariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Bagian tersebut mempunyai peranan untuk menyebarkan informasi dan mengontrol arus informasi yang akan disebarkan oleh masing-masing unit pelayanan teknis.

a. Data Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan berdasarkan hasil dari wawancara dengan responden yaitu pejabat imigrasi pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan dan observasi yang dilakukan secara dalam jaringan.

Data primer lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan humas pemerintah seperti:

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktu Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Data Sekunder

Sumber data yang penulis gunakan adalah Pedoman Pengelolaan Media Sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu sumber data sekunder lainnya diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Komunikasi pemerintahan yang bersifat eksternal organisasi dilakukan oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian dilakukan oleh HUMAS. Peran HUMAS masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian dituntut untuk menyebarkan informasi dengan berbagai media yang ada. Salah satu media yang digunakan untuk melakukan penyebaran informasi adalah melalui media sosial. Instagram, twitter, facebook, dan lain sebagainya merupakan media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi melalui konten infografis yang disebarkan.

Secara garis besar tim HUMAS dari masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian dapat membuat sebuah desain infografis berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh direktorat. Berdasarkan temuan yang ditemukan oleh penulis bahwa pedoman yang dikeluarkan oleh direktorat sudah dijalankan oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian dengan beberapa tambahan-tambahan unsur desain lainnya mengikuti Teori Desain Komunikasi Visual. Penambahan unsur-unsur desain lain yang dituangkan kedalam

[1] *Followers* adalah merupakan pengikut dimedia sosial Instagram, berguna untuk mengikuti atau berteman dengan pengguna lain yang menggunakan Instagram.

[2] *Posting* adalah istilah dari kegiatan membagikan/ mengunggah foto atau video di media sosial Instagram.

[3] *verified* atau *verification badge* adalah sebuah simbol bentuk centang biru di samping nama akun suatu pengguna, berguna membantu pengguna lain untuk mengetahui keaslian dari suatu akun.

Vol. 4 No. 2 2020

Submitted 09-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 12-10-2020

sebuah konten infografis menambahkan mutu dari penyampaian informasi yang diberikan oleh suatu Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian. Sebagai contoh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta menyamakan setiap warna *background* konten infografis yang disebarkan setiap bulannya. Tim HUMAS Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta telah memilih warna tertentu yang akan dijadikan tema warna setiap bulannya, dengan demikian akan menambahkan mutu dari penyampaian informasi yang akan diterima kepada masyarakat.

Terlihat dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis bahwa masih kurang maksimalnya penggunaan unsur-unsur desain yang ada pada Teori Desain Komunikasi Visual untuk meningkatkan mutu dari penyebaran konten infografis. Hal ini masih terbatas pada satu unsur desain yaitu unsur desain *layout*, yang seharusnya dapat lebih dimanfaatkan lagi lebih baik jika hanya ingin menggunakan satu jenis unsur desain sebagai cara untuk meningkatkan mutu. Sebagai contoh Kantor Imgirasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta selalu meletakan logo Imigrasi dan nama kantor di kiri atas dan dibagian kanan menggunakan logo yang seharusnya tidak perlu diletakan. Peletakan logo-logo yang tidak perlu diletakkan dikarenakan tidak sesuai dengan keperuntukannya karena logo tersebut tidak diketahui atau tidak dimengerti oleh publik apa tujuan dan maknanya.

Agar suatu infografis yang disebarkan oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis memiliki mutu yang baik dan memperoleh penilai kredibel dari masyarkat, perlu adanya suatu kesamaan atau standardisasi yang digunakan dalam desain infografis. Standardisasi desain infografis bertujuan untuk menyamakan ciri khas dari instansi Imigrasi. Hal tersebut merupakan salah satu poin penting dalam meningkatkan mutu dari penyebaran informasi kepada publik, dimana ketika terjadi penyamaan atau standardisasi dari desain infografis yang dikeluarkan oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian. Penyamaan ataupun standardisasi desain infografis tidak akan menimbulkan keterbatasan ruang gerak dari desainer untuk membuat suatu desain infografis, tetapi akan membantu para desainer untuk membuat suatu desain yang akan mendukung terjadinya penyamaan ciri khas ataupun karakteristik penanda instansi imigrasi. Sebagai contoh bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber dan observasi bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta secara tidak langsung sudah menetapkan suatu standar bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta telah menyebarkan konten infografis dengan menyamakan warna konten infografis perbulannya. Hal tersebut secara tidak langsung akan menggiring opini publik bahwa ciri khas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Soekarno Hatta adalah penggantian warna dari konten infografis perbulannya.

Komponen standardisasi desain infografis yang dimaksud akan mengikuti unsur-unsur desain yang ada pada Teori Desain Komunikasi Visual. Standardisasi desain infografis ini akan dibungkus dengan sebuah pedoman yang nantinya akan memperkuat kewajiban dari masing-masing humas di Unit Pelayanan Teknis untuk mengikuti standardisasi desain infografis tersebut tanpa terkecuali. Oleh karena itu perlu adanya standardisasi desain infografis yang nantinya akan meningkatkan mutu sekaligus kredibilitas di mata publik terhadap komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh masing-masing Kantor Imigrasi.

Selama ini pembuatan konten infografis yang disebarkan oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian yang ada mengacu pada pedoman yang diberikan oleh direktorat ditambah dengan unsur-unsur desain yang ada pada Teori Desain Komunikasi Visual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa masih belum

Vol. 4 No. 2 2020

Submitted 09-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 12-10-2020

maksimalnya penggunaan unsur-unsur desain yang ada pada Teori Desain Komunikasi Visual. Menurut keterangan dari salah satu narasumber yaitu staf pelaksana pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan masih kurangnya pengetahuan tentang Teori Desain Komunikasi Visual. Selain itu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta juga menyatakan bahwa kekurangan yang dimiliki oleh para tim humas masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian dikarenakan oleh latar belakang pendidikan yang ada pada tim humas masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh tim humas pada masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian tidak ada yang memiliki pendidikan menjadi seorang desainer. Oleh karena itu konten infografis yang dibuat dan disebarkan oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian juga masih memiliki kekurangan. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekertariat Direktorat Jenderal Imigrasi juga menyampaikan bahwa harus adanya penambahan unsur-unsur desain yang ada pada pedoman yang dimiliki oleh Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian. Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh penulis melalui wawancara dari beberapa narasumber, didapatkan beberapa temuan bahwa masih kurangnya pengetahuan terhadap unsur-unsur desain yang seharusnya bisa digunakan.

Pedoman yang dimaksud adalah Pedoman Pengelolaan Sosial Media, dimana dalam pedoman tersebut mengatur bagaimana seorang desainer membuat suatu desain yang terdiri dari unsur desain warna, unsur desain tipografi dalam hal ini hanya pada jenis huruf yang digunakan, dan unsur desain *layout* yaitu peletakan logo instansi. Unsur desain yang digunakan oleh HUMAS masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian sudah menggunakan unsur-unsur desain lainnya seperti unsur desain bentuk *(shape)*, tipografi, ukuran *(size)*, garis *(line)*, warna *(color)* dan *layout* tetapi pada penggunaan unsur-unsur desain tersebut masih sangat minim penggunaannya.

Standardisasi yang harus digunakan sebagai pedoman pembuatan desain infografis harus merujuk pada Teori Desain Komunikasi Visual. Dalam Teori Desain Komunikasi Visual terdapat beberapa unsur yang perlu hadir dalam suatu desain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa memang benar masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian telah menggunakan sebagian unsur desain yang ada pada Teori Desain Komunikasi Visual. Penggunaan ini masih belum dilakukan secara maksimal oleh tim humas pada masing-masing Unit Pelayanan Teknis. Sebagai contoh adalah penggunaan unsur desain ukuran *(size)*, menurut Lia Anggraini dan Nathalia (2014) unsur desain ukuran *(size)* adalah perbedaan besar kecilnya suatu obyek dengan menggunakan unsur ini dapat menciptakan kontras dan penekanan *(emphasis)* pada suatu desain yang dibuat. Sedangkan unsur desain ukuran *(size)* dalam penggunaannya masih sangat kurang diterapkan dalam pembuatan desain infografis, hal ini bisa terlihat dari gambar 36. Dalam gambar 36 terlihat seharusnya penekanan yang ada dalam desain tersebut harus lebih informasi yang ada didalam infografis tersebut, sedangkan pada eksekusinya informasi yang diberikan oleh infografis tersebut malah tidak terlihat ataupun tidak dapat terbaca dengan baik.

Adapun standardisasi yang seharusnya digunakan oleh Kantor Imigrasi agar meningkatkan mutu sekaligus kredibilitas adalah dengan meningkatkan penggunaan unsur desain yang ada pada Teori Desain Komunikasi Visual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa masih belum tahunya tim humas yang bekerja di Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian membuat kurang maksimalnya penggunaan unsur-unsur desain yang sudah digunakan. Akan

Vol. 4 No. 2 2020

Submitted 09-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 12-10-2020

tetapi karena kurangnya pengetahuan akan Teori Desain Komunikasi Visual para staf pelaksana pada tim humas juga secara tidak sadar telah menggunakan unsur-unsur desain yang telah disebutkan penulis diluar dari pedoman yang diberikan oleh direktorat. Untuk menunjang standardisasi pembuatan desain infografis harus adanya penambahan unsur-unsur desain yang harus digunakan, beberapa unsur desain tersebut adalah:

a. Penggunaan unsur desain garis *(line)*
b. Penggunaan unsur desain bentuk *(shape)*
c. Penggunaan unsur desain ukuran *(size)*
d. Penggunaan unsur desain warna *(color)*
e. Penggunaan unsur desain tipografi
f. Penggunaan unsur desain *layout*

Berdasarkan unsur-unsur desain tersebut akan terbentuk sebuah standardisasi desain infografis yang akan digunakan Kantor Imigrasi untuk membuat komunikasi pemerintahan yang kredibel. Standardisasi infografis yang digunakan nantinya akan dibuat menjadi sebuah pedoman yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh tim humas masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian. Pembuatan pedoman standardisasi infografis ini akan dibuat melalui rapat bersama yang dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekertariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Pembuatan pedoman harus melibatkan seluruh tim humas dari masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian, hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari masing-masing desainer yang bekerja untuk membuat desain konten infografis pada setiap Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian.

KESIMPULAN

Komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dapat ditingkatkan dengan berpedoman pada standardisasi desain infografis standardisasi tersebut merupakan rekomendasi yang penulis berikan untuk dijadikan bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi sekaligus menjadi *output* dari penelitian ini. Standardisasi ini nantinya akan meningkatkan mutu sekaligus kredibilitas komunikasi yang tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tapi bagi seluruh Kantor Imigrasi yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu bertujuan untuk membangun citra dan reputasi positif dari instansi Imigrasi. Adanya hal ini akan memberikan dampak berupa kepercayaan publik terhadap informasi yang disebarkan oleh masing-masing Unit Pelayan Teknis Keimigrasian yang nantinya akan menjadi *outcome* dari adanya standardisasi desain infografis.

SARAN

1. Perlu diadakannya perumusan bersama oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan humas dari masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi, Atase Imigrasi yang berada di Perwakilan Luar Negeri dan lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang Humas untuk menghasilkan standardisasi desain infografis yang akan dijadikan pedoman dan penetapan pedoman yang berisi standardisasi desain infografis.
2. Perlu adanya penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait dengan hal desain dan adanya pelatihan kepada tim humas di masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian terkait dengan Teori Desain Komunikasi Visual. Pelatihan yang diberikan harus menjelaskan secara jelas apa itu desain komunikasi visual kepada para desainer yang bekerja sebagai tim bumas di masing-masing Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian.

Vol. 4 No. 2 2020

Submitted 09-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 12-10-2020

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Y. Z. (2016). *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi* (Cetakan I). Pustaka Setia.

Anggraini, L., & Nathalia, K. (2014). *Desain Komunikasi Visual: Dasar-Dasar Panduan Pemula*. Nuansa Cendekia.

Arifin, A. (1988). *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*. Rajawali Press.

Arigia, M. B., Damayanti, T., & Sani, A. (2016). Infografis Sebagai Media Dalam Meningkatkan Pemahaman dan Keterlibatan Publik Bank Indonesia. *Jurnal Komunikasi Universitas Padjadjaran*, *8*(2).

O'Brien, J. A. (2003). *Introduction to Information System*. Irwin: McGraw-Hill.

Pettersson, R. (1993). *Visual Information*. Educational Technology Publisher.

Widayanti, F. D. (2013). Pentingnya Mengetahui Gaya Belajar Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran Di Kelas. *Jurnal Erudio, 2*(1).